Etika Profesional dalam Menjaga Kerahasiaan dan Objektivitas Asesmen Psikologi: Kajian Literatur pada Praktik Bimbingan dan Konseling

Zharima Berlian Ningrum *¹

¹ Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya

*e-mail : 24010014037@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip etika profesional dalam menjaga kerahasiaan dan objektivitas asesmen psikologi pada praktik bimbingan dan konseling. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis sumber-sumber akademik seperti jurnal, buku, dan kode etik psikologi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerahasiaan adalah aspek fundamental yang menjamin keamanan psikologis klien, terutama dalam konteks konseling digital yang rawan kebocoran data. Objektivitas asesmen juga harus dijaga dengan menjauhkan bias pribadi dan tekanan eksternal dalam proses evaluasi. Pemahaman terhadap kode etik, nilai moral, dan pendekatan spiritual memperkuat integritas konselor dalam menghadapi dilema etika. Pendidikan dan pelatihan etika yang berkelanjutan menjadi kunci dalam membentuk profesionalisme layanan konseling. Kesimpulannya, etika profesional bukan hanya sebagai aturan tertulis, tetapi sebagai komitmen moral yang melekat dalam praktik konseling. Kajian ini memberikan masukan konseptual untuk penguatan etika dalam layanan asesmen psikologi.

Kata kunci: etika profesional, kerahasiaan, objektivitas, asesmen psikologi, bimbingan dan konseling.

Abstract

This study aims to examine the principles of professional ethics in maintaining confidentiality and objectivity in psychological assessment within guidance and counseling practices. The research employed a literature review method, analyzing academic sources such as journals, books, and psychological ethical codes. The findings indicate that confidentiality is a fundamental aspect that ensures clients' psychological safety, particularly in digital counseling vulnerable to data breaches. Objectivity must also be preserved by eliminating personal bias and external pressures during the assessment process. Understanding ethical codes, moral values, and spiritual approaches enhances counselors' integrity in addressing ethical dilemmas. Continuous ethics education and training are crucial in shaping counseling professionalism. In conclusion, professional ethics is not merely a set of written rules but a moral commitment embedded in counseling practice. This review offers conceptual input to strengthen ethical conduct in psychological assessment services.

Keywords: professional ethics, confidentiality, objectivity, psychological assessment, guidance and counseling

PENDAHULUAN

Asesmen psikologi memiliki peran penting dalam proses bimbingan dan konseling karena dapat memberikan gambaran objektif terhadap kondisi psikologis klien. Dalam praktiknya, asesmen harus dilandasi prinsip etika profesional, terutama dalam menjaga kerahasiaan data pribadi dan hasil asesmen. Menurut Himpunan Psikologi Indonesia (2010), menjaga kerahasiaan adalah salah satu kewajiban utama psikolog dan konselor dalam menjalankan praktik asesmen secara bertanggung jawab. Selaras dengan panduan yang diberikan dalam Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct, aspek kerahasiaan bukan hanya etis, tetapi juga mencerminkan penghargaan terhadap martabat dan hak klien (Code & Psychologists, 2017). Selain itu, Nystul (2015) menekankan pentingnya integritas konselor dalam menyampaikan hasil asesmen secara objektif tanpa intervensi bias pribadi. Oleh karena itu, penegakan prinsip etika dalam asesmen merupakan fondasi utama dari profesionalisme konseling.

Permasalahan yang muncul dalam praktik asesmen psikologi di lapangan adalah belum optimalnya pemahaman dan penerapan etika oleh sebagian konselor. Menurut penelitian oleh Nurmaulidya, Nurbaeti, dan Marjo (2021), beberapa konselor di setting komunitas masih mengalami kebingungan dalam menjaga kerahasiaan data asesmen. Hal ini dapat berdampak pada

rusaknya kepercayaan antara klien dan konselor, yang kemudian mengganggu efektivitas konseling. Selain itu, tantangan baru juga muncul dalam layanan konseling berbasis digital yang menuntut pengelolaan data lebih hati-hati (Anindya, Budiman, & Nadhiroh, 2024). Selaras dengan itu, dilema etis juga sering timbul saat konselor mengalami tekanan dari pihak sekolah atau orang tua untuk mengungkap informasi rahasia klien (Pawlukewicz & Ondrus, 2013). Dengan demikian, penting dilakukan kajian literatur untuk menelaah strategi yang dapat dilakukan konselor dalam menjaga objektivitas dan kerahasiaan asesmen secara profesional.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip etika profesional yang berkaitan dengan kerahasiaan dan objektivitas dalam asesmen psikologi pada praktik bimbingan dan konseling. Menurut Nurismawan, Fahrani, dan Naqiyah (2022), pemahaman terhadap aspek aksiologi dalam profesi konselor sangat penting agar etika tidak hanya dijalankan sebagai aturan, tetapi juga menjadi bagian dari nilai-nilai pribadi. Selaras dengan Nystul (2015), konselor yang memahami dimensi etika secara mendalam akan lebih mampu menghadapi dilema yang muncul dalam proses asesmen. Kajian ini juga ingin menyoroti pentingnya kode etik sebagai panduan moral dan profesional dalam pelaksanaan asesmen (Code & Psychologists, 2017). Dengan merujuk pada sumber-sumber literatur yang relevan, penulisan ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai penerapan etika dalam asesmen psikologi. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan konseptual dan praktis bagi konselor dalam meningkatkan kualitas layanan asesmen yang etis dan bertanggung jawab.

KAJIAN TEORI

Etika profesional dalam asesmen psikologi menekankan dua prinsip utama, yakni menjaga kerahasiaan informasi klien dan mempertahankan objektivitas dalam pelaksanaan serta interpretasi hasil asesmen. Menurut Kode Etik Psikologi Indonesia (Himpunan Psikologi Indonesia, 2010), setiap psikolog atau konselor wajib merahasiakan segala informasi yang diperoleh dalam praktik asesmen, kecuali atas izin tertulis klien atau alasan hukum yang sah. Selaras dengan panduan dari American Psychological Association, prinsip confidentiality dan integrity merupakan pilar utama dalam menjamin hak dan martabat individu selama proses asesmen berlangsung (Code & Psychologists, 2017). Objektivitas dalam asesmen juga harus dijaga agar konselor tidak mencampurkan nilai-nilai pribadi atau tekanan eksternal dalam menilai kondisi psikologis klien. Nystul (2015) menekankan bahwa asesmen yang profesional menuntut kemampuan reflektif konselor dalam membedakan antara interpretasi objektif dengan asumsi pribadi. Dengan demikian, pemahaman terhadap prinsip etika ini menjadi dasar yang tidak dapat diabaikan dalam praktik bimbingan dan konseling.

METODE

Menurut Sugiyono (2017), metode studi literatur merupakan salah satu pendekatan penelitian kualitatif yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder dari sumber tertulis yang relevan. Berdasarkan pendekatan tersebut, artikel ini menggunakan metode studi literatur untuk mengkaji dan menganalisis berbagai sumber akademik terkait etika profesional dalam menjaga kerahasiaan dan objektivitas asesmen psikologi pada praktik bimbingan dan konseling. Materi yang dikaji meliputi kode etik psikologi, prinsip-prinsip kerahasiaan, serta tantangan dan solusi dalam mempertahankan objektivitas asesmen. Sumber data diperoleh dari jurnal, buku, dan dokumen resmi yang terpercaya, dengan teknik pengumpulan data melalui pencarian sistematis pada database akademik dan perpustakaan digital. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menyusun, mengelompokkan, dan mensintesis informasi penting dari literatur yang ada. Penelitian ini tidak menggunakan model statistik karena fokus pada analisis teoritis dan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika profesional dalam menjaga kerahasiaan klien merupakan aspek fundamental dalam praktik bimbingan dan konseling yang harus dijaga secara ketat. Menurut Anindya, Budiman, dan Nadhiroh (2024), kerahasiaan bukan hanya kewajiban hukum tetapi merupakan pondasi moral

yang menjamin klien merasa aman untuk membuka permasalahan pribadi mereka. Dalam praktik layanan konseling daring, tantangan menjaga kerahasiaan semakin besar karena risiko kebocoran data melalui platform digital. Penelitian tersebut menyoroti pentingnya prosedur teknis dan kebijakan internal yang ketat untuk melindungi informasi klien. Kode Etik Psikologi Indonesia (2010) menegaskan kewajiban konselor untuk menjaga kerahasiaan data klien kecuali dalam kondisi yang diatur secara hukum. Dengan demikian, pelestarian kerahasiaan adalah elemen utama untuk membangun kepercayaan dalam hubungan konseling.

Objektivitas dalam proses asesmen psikologi menjadi kunci untuk menghasilkan evaluasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nurmaulidya, Nurbaeti, dan Marjo (2021) menyatakan bahwa bias subjektif dan prasangka pribadi dapat merusak integritas hasil asesmen dan berdampak negatif terhadap intervensi yang diberikan. Dalam konteks ini, konselor harus mampu memisahkan penilaian personal dari data yang diperoleh melalui metode ilmiah. Supadmi et al. (2023) juga menekankan pentingnya profesionalisme yang mengedepankan sikap netral dan berbasis bukti dalam pengambilan keputusan. Pawlukewicz dan Ondrus (2013) menambahkan bahwa tekanan eksternal dan konflik kepentingan seringkali menjadi dilema yang mengancam objektivitas, sehingga manajemen etika yang baik diperlukan. Oleh karena itu, menjaga objektivitas merupakan kewajiban moral dan profesional yang tak boleh diabaikan.

Penerapan kode etik profesional merupakan pedoman yang mengatur perilaku konselor dalam menjalankan tugasnya. Husni dan Muhammad (2021) menegaskan bahwa dalam perspektif Islam, nilai amanah dan kejujuran menjadi landasan moral yang menguatkan integritas kerja konselor. Kode Etik Psikologi Indonesia (2010) secara jelas mengatur standar perilaku dan tanggung jawab profesional untuk melindungi klien dari potensi penyalahgunaan informasi. Selain itu, Nurismawan, Fahruni, dan Naqiyah (2022) menjelaskan bahwa pemahaman aksiologi etika dapat meningkatkan kualitas layanan dan memperbaiki hubungan konseling. Pengetahuan yang mendalam tentang kode etik memungkinkan konselor untuk mengambil keputusan yang tepat dalam situasi etis yang kompleks. Dengan demikian, kode etik tidak hanya menjadi aturan formal, melainkan juga pedoman moral dan profesional yang hidup.

Dalam era digital, tantangan menjaga kerahasiaan dan integritas data semakin kompleks. Anindya et al. (2024) menyoroti bahwa layanan konseling daring menuntut protokol keamanan yang lebih ketat dan teknologi yang memadai agar data klien tidak mudah diakses oleh pihak tidak berwenang. Pelatihan khusus mengenai etika dan keamanan data digital perlu diberikan kepada konselor agar mereka mampu mengantisipasi dan mengelola risiko tersebut. Code dan Psychologists (2017) menyarankan pembaruan kode etik secara berkala agar selalu relevan dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan profesional. Supadmi et al. (2023) juga menggarisbawahi pentingnya kesadaran etika yang responsif terhadap dinamika teknologi dalam praktik konseling. Dengan demikian, etika profesional harus berkembang mengikuti zaman, terutama terkait pengelolaan informasi digital.

Pengetahuan konselor tentang etika profesional secara langsung memengaruhi kualitas layanan yang diberikan di berbagai setting konseling. Studi Nurmaulidya, Nurbaeti, dan Marjo (2021) menunjukkan bahwa konselor yang memahami prinsip etika mampu menjalankan praktik dengan lebih bertanggung jawab dan menjaga hubungan konseling yang sehat. Mereka juga lebih sigap dalam mengatasi permasalahan etis yang muncul selama proses asesmen dan intervensi. Nurismawan, Fahruni, dan Naqiyah (2022) menambahkan bahwa pendidikan dan pelatihan etika profesional perlu ditingkatkan secara berkelanjutan agar konselor selalu siap menghadapi situasi baru dan dilema etis. Oleh karena itu, penguatan kompetensi etika menjadi kebutuhan mendesak untuk mempertahankan profesionalisme dalam layanan bimbingan dan konseling.

Dalam konteks hubungan kekuasaan antara konselor dan klien, etika menjadi pagar penting untuk menghindari dominasi atau manipulasi dalam proses asesmen. Klien berada dalam posisi yang rentan karena membuka informasi personal dan membutuhkan bantuan psikologis. Oleh karena itu, konselor harus menjaga batasan profesional agar tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Menurut Nystul (2015), relasi yang setara dan kolaboratif menjadi model ideal yang menjunjung tinggi prinsip etika dan martabat klien. Dalam asesmen, penyampaian hasil sebaiknya dilakukan dengan pendekatan empatik dan edukatif agar klien

merasa dihargai. Pelanggaran terhadap keseimbangan relasi ini dapat merusak kepercayaan dan validitas data yang dikumpulkan.

Isu terbaru dalam etika asesmen psikologi adalah bagaimana konselor menyikapi penggunaan aplikasi konseling dan penyimpanan data berbasis cloud. Teknologi memudahkan akses, namun juga meningkatkan risiko pelanggaran privasi. Menurut Anindya et al. (2024), konselor wajib memahami bagaimana aplikasi menyimpan dan memproses data serta harus memastikan penggunaannya sesuai dengan prinsip etika. Tanpa pemahaman yang cukup, konselor bisa saja secara tidak sadar membagikan data ke pihak ketiga melalui aplikasi. Oleh karena itu, literasi digital dan kebijakan perlindungan data harus menjadi bagian dari pengembangan profesional. Dalam era digital, keamanan informasi menjadi tanggung jawab moral dan legal yang tidak bisa diabaikan.

Dampak dari pelanggaran etika asesmen psikologi tidak hanya dirasakan oleh klien, tetapi juga mencoreng reputasi profesi konseling secara keseluruhan. Ketika ada kasus pelanggaran seperti pembocoran rahasia klien, publik akan kehilangan kepercayaan terhadap profesi ini. Menurut Pawlukewicz dan Ondrus (2013), konsekuensi etis bisa berupa sanksi etik, pencabutan lisensi, atau gugatan hukum. Oleh karena itu, setiap konselor harus menyadari bahwa menjaga etika adalah bagian dari menjaga kelangsungan profesinya. Pendidikan etik tidak boleh berhenti pada pelatihan awal, tetapi harus terus diperbarui melalui lokakarya dan supervisi. Kepekaan terhadap isu etik menjadi indikator penting kedewasaan profesional konselor.

Landasan etika dalam bimbingan dan konseling juga mendapat dukungan kuat dari perspektif Islam yang menekankan nilai-nilai moral seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial. Husni dan Muhammad (2021) menguraikan bahwa nilai-nilai tersebut tidak hanya mendasari perilaku konselor tetapi juga memperkuat komitmen mereka dalam menjaga kerahasiaan dan objektivitas. Pendekatan ini memberi dimensi spiritual yang memperkaya kode etik profesional dan memperkuat etika kerja konselor. Implementasi nilai agama dapat membantu konselor menghadapi dilema moral dan menjaga integritas di tengah tekanan praktik. Dengan demikian, integrasi perspektif keagamaan dalam etika profesional menjadi salah satu strategi efektif dalam meningkatkan kualitas layanan. Pendekatan ini juga memungkinkan konseling memberikan manfaat yang lebih holistik bagi klien.

Dalam konteks praktik bimbingan dan konseling di sekolah dan komunitas, etika profesional berperan penting dalam membangun kepercayaan antara konselor dan klien. Nurismawan, Fahruni, dan Naqiyah (2022) menemukan bahwa konselor yang berpegang pada prinsip etika mampu memberikan layanan yang lebih bermutu dan dipercaya oleh klien. Hal ini juga sejalan dengan temuan Nurmaulidya et al. (2021) yang menegaskan bahwa pemahaman etika meningkatkan kesadaran konselor untuk menjaga integritas dalam berbagai situasi. Kepercayaan yang terbangun akan memudahkan proses asesmen dan intervensi yang efektif. Selain itu, kode etik membantu konselor menghadapi tantangan etika yang muncul akibat dinamika sosial dan budaya. Oleh karena itu, etika profesional adalah modal utama dalam praktik layanan yang berkualitas.

Dilema etika sering muncul dalam praktik bimbingan dan konseling ketika konselor menghadapi konflik antara kewajiban menjaga kerahasiaan dan kebutuhan untuk melindungi klien atau orang lain dari bahaya. Pawlukewicz dan Ondrus (2013) menjelaskan bahwa pengambilan keputusan etis membutuhkan pertimbangan matang dan penerapan prinsip-prinsip moral yang seimbang. Situasi seperti ini menuntut konselor untuk mengutamakan kepentingan terbaik klien sambil tetap mematuhi kode etik yang berlaku. Kode Etik Psikologi Indonesia (2010) memberikan panduan jelas mengenai pengecualian kerahasiaan dalam kondisi darurat tertentu. Dengan demikian, kemampuan konselor dalam mengelola dilema etis menjadi salah satu aspek penting dalam profesionalisme yang harus dikembangkan secara terus-menerus.

Asesmen psikologi yang dilakukan dalam praktik bimbingan dan konseling juga harus memperhatikan aspek validitas budaya agar tidak terjadi kesalahan interpretasi yang merugikan klien. Menurut Nystul (2015), asesmen yang tidak mempertimbangkan latar belakang sosial-budaya klien dapat mengarah pada hasil yang bias dan tidak representatif. Hal ini penting khususnya di Indonesia, di mana keberagaman budaya sangat tinggi dan memengaruhi cara

individu merespons instrumen psikologis. Oleh karena itu, konselor wajib menggunakan alat ukur yang telah terstandarisasi secara lokal atau menyesuaikan interpretasi berdasarkan konteks budaya. Sesuai dengan penekanan dari Nurismawan et al. (2022), kemampuan konselor untuk memahami konteks klien menjadi salah satu kompetensi etis yang wajib dimiliki. Dengan pendekatan ini, objektivitas asesmen dapat terjaga tanpa mengabaikan keunikan identitas klien.

Pengembangan kesadaran etis harus menjadi bagian dari proses pembelajaran dan supervisi sepanjang karier konselor, bukan hanya pada masa pelatihan awal. Nurmaulidya et al. (2021) menekankan bahwa banyak pelanggaran etika terjadi bukan karena niat buruk, melainkan karena ketidaktahuan atau rendahnya sensitivitas terhadap situasi etis. Oleh karena itu, diperlukan sistem pembinaan yang berkelanjutan dalam bentuk diskusi kasus, studi literatur, dan pelatihan etik berbasis pengalaman nyata. HIMPSI (2010) juga mendorong adanya refleksi berkala terhadap praktik konseling sebagai upaya menjaga standar profesionalisme. Pembentukan budaya etis di lingkungan kerja menjadi penting agar setiap konselor merasa bertanggung jawab secara kolektif terhadap mutu layanan. Dengan demikian, konselor tidak hanya bekerja berdasarkan aturan, tetapi juga berdasarkan kesadaran moral yang matang.

Pendidikan dan pelatihan etika profesional yang berkelanjutan menjadi faktor krusial untuk meningkatkan kemampuan konselor dalam menghadapi tantangan praktik. Nurmaulidya, Nurbaeti, dan Marjo (2021) menekankan bahwa pelatihan yang fokus pada penerapan kode etik dan pengembangan kesadaran etika membantu konselor meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, Supadmi et al. (2023) menggarisbawahi pentingnya pengembangan kompetensi digital dan etika terkait teknologi untuk mengantisipasi risiko dalam layanan konseling online. Pendidikan berkelanjutan ini tidak hanya memperkuat pengetahuan teoretis tetapi juga membentuk sikap profesional yang etis dalam setiap aspek pekerjaan. Dengan demikian, investasi dalam pendidikan dan pelatihan etika sangat penting untuk menjamin konseling yang bermutu dan terpercaya.

Kesimpulannya, etika profesional dalam menjaga kerahasiaan dan objektivitas asesmen psikologi merupakan pilar utama dalam praktik bimbingan dan konseling yang berkualitas. Pelaksanaan kode etik secara konsisten, didukung oleh pemahaman nilai moral dan pendekatan spiritual, mampu meningkatkan integritas dan kepercayaan klien. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan penguatan kompetensi etika juga menjadi syarat mutlak untuk menjaga profesionalisme di era digital. Kajian literatur ini menggarisbawahi pentingnya pelatihan berkelanjutan dan pendidikan etika sebagai fondasi dalam menghadapi berbagai dilema profesional. Oleh karena itu, konselor harus menjadikan etika profesional sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil demi keberhasilan layanan yang optimal dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Simpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa etika profesional merupakan fondasi utama dalam menjaga kerahasiaan dan objektivitas asesmen psikologi di ranah bimbingan dan konseling. Konselor yang berpegang teguh pada prinsip etika mampu membangun kepercayaan klien dan menjalankan tugas secara bertanggung jawab. Penegakan kerahasiaan menjadi keharusan moral yang tidak dapat ditawar, terlebih dalam konteks layanan konseling berbasis digital. Objektivitas asesmen hanya dapat tercapai jika konselor menjauhkan diri dari bias pribadi dan tekanan eksternal. Pemahaman mendalam terhadap kode etik dan nilai moral, termasuk nilai-nilai spiritual, memperkuat integritas konselor dalam menghadapi dilema etis. Kajian literatur ini menegaskan bahwa pendidikan dan pelatihan etika secara berkelanjutan sangat penting dalam meningkatkan profesionalisme layanan. Etika tidak hanya menjadi panduan perilaku, tetapi juga harus tertanam dalam kesadaran pribadi sebagai bentuk komitmen terhadap kualitas layanan. Oleh karena itu, etika profesional bukan sekadar aturan, melainkan identitas moral konselor yang menentukan keberhasilan interaksi konseling.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindya, J., Budiman, N., & Nadhiroh, N. A. (2024). Etika Profesi Bimbingan dan Konseling: Menghadapi Tantangan Kerahasiaan dalam Layanan Konseling Online. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 8(1), 25-35. <https://doi.org/10.30653/001.202481.329>
- Code, A. E., & Psychologists, P. L. (2017). Ethical principles of Psychologist and code of conduct. Published online. <http://www.lsbep.org/wp-content/uploads/APA-Ethical-Principles-of-Psychologists.pdf>
- Husni, M., & Muhammad, H. (2021). Landasan bimbingan dan konseling dalam Perspektif Islam. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*, 6(1), 103-124. <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/126>
- Indonesia, H. P. (2010). Kode etik psikologi Indonesia. Jakarta: HIMPSI. https://dosen.upi-yai.ac.id/v5/dokumen/materi/990981/105_20241204093347_Handout-PSY204-Kode-Etik-Psikologi-Indonesia.pdf
- Nurismawan, A. S., Fahrani, F. E., & Naqiyah, N. (2022). Studi Aksiologi Etika Konselor dalam Memperbaiki Pemberian Layanan Konseling Individu di Sekolah. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(1), 65-70. <https://doi.org/10.23887/jfi.v5i1.42036>
- Nurmaulidya, A., Nurbaeti, N., & Marjo, H. K. (2021). Pengetahuan Konselor Dalam Etika Profesional Pada Konseling Setting Komunitas. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 7(1), 53-63. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/cobaBK/article/view/8615>
- Nystul, M. S. (2015). *Introduction to counseling: An art and science perspective*. Sage Publications. <https://books.google.co.id/books?id=QFc0CgAAQBAJ&lpg=PP1&ots=u51pgj3KX0&dq=Introduction%20to%20counseling%20and%20guidance&lr&pg=PR9#v=onepage&q=Introduction%20to%20counseling%20and%20guidance&f=false>
- Pawlukewicz, J., & Ondrus, S. (2013). Ethical dilemmas: The use of applied scenarios in the helping professions. *Journal of Social Work Values and Ethics*, 10(1), 2-12. <https://www.jswve.org/wp-content/uploads/2013/01/10-010-102-JSWVE-2013.pdf>
- Supadmi, S. S., Pd, M., Ahmad, A. K., Nurmina, M. P., Walid, A., Rachmijati, C., ... & Pratama, F. A. (2023). *Psikologi pendidikan*.